

**PEMUNGUTAN SUARA DI LUAR JADWAL DAN
MALPRAKTIK PEMILIHAN
Studi Kasus: Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)
di Kabupaten Batang Hari pada Pemilihan Serentak Tahun 2020**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas



**KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

ABSTRAK

Nama : Febriansyah Kurniawan
Program Studi : Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu
Judul : Pemungutan Suara Di Luar Jadwal dan Malpraktik Pemilihan (Studi Kasus: Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di Kabupaten Batang Hari pada Pemilihan Serentak Tahun 2020)
Pembimbing I : Dr. Zainal Arifin, M. Hum.
Pembimbing II : Dr. Indah Adi Putri, S. IP.

Kekurangan Surat Suara di TPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Batang Hari menimbulkan persoalan pelik. Bermula di TPS 2 Desa Kaos yang gagal memfasilitasi hak pilih 53 orang pemilih, Bawaslu Kabupaten Batang Hari merekomendasikan dilaksanakannya Pemungutan Suara Lanjutan. Di sisi lain, terdapat pula TPS lain yang menampilkan fenomena banyak pemilih yang tidak terfasilitasi hak pilihnya akibat kekurangan surat suara yang terjadi. Penelitian mendeskripsikan hasil kajian mengenai malpraktik pemilihan sejak pengelolaan logistik, mekanisme penanganan kekurangan surat suara dijalankan hingga proses penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Batang Hari dan dalam Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang direkomendasikan. Penelitian bersifat kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang menganalisis pada data primer bersumber dari hasil wawancara dan disandingkan dengan data sekunder yang didapatkan dari sumber lainnya. Data dianalisis berdasarkan konsepsi malpraktik pemilihan Chad Vickery dan Erica Shein untuk mengidentifikasi praktik penyimpangan pemilihan yang ditemukan, serta hasil penelitian Ramlan Surbakti, dkk yang menemukan bahwa malpraktik pemilihan dapat memicu praktik-praktik penyimpangan lanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerbitan rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) oleh Bawaslu Kabupaten Batang Hari tidak hanya dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran administrasi, namun lebih mengarah kepada meredakan polemik serta desakan di luar penyelenggara pemilihan itu sendiri. Bawaslu Kabupaten Batang Hari pun turut melakukan praktik penyimpangan dengan mengabaikan TPS lain yang memiliki kecenderungan persoalan yang sama. Hasil penelitian juga menunjukkan fenomena lain jika disandingkan dengan konsepsi yang dirumuskan oleh Chad Vickery dan Erica Shein, bahwa malpraktik pemilihan tidaklah serta merta hanya mengenai ketidaksengajaan oleh penyelenggara, namun juga dapat muncul dalam upaya sadar akan tetapi tidak mengarah kepada tujuan untuk mempengaruhi proses atau hasil pemilihan itu sendiri. Sejalan dengan pendapat Ramlan Surbakti, temuan penelitian juga menunjukkan fenomena malpraktik pemilihan yang terus menerus berlanjut menghadirkan malpraktik atau praktik penyimpangan lainnya. Penelitian ini juga mengungkapkan pola malpraktik pemilihan yang berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya yakni malpraktik pemilihan bukan dimulai dari penyelenggara tingkat bawah di TPS namun justru oleh penyelenggara pemilihan di tingkat atas yang dalam hal ini adalah KPU tingkat kabupaten.

Kata kunci: pemilihan serentak, pemungutan suara lanjutan, malpraktik, praktik penyimpangan